

TAJUK RENCANA

Tantangan Desa Mandiri Budaya DIY

PEMERINTAH DIY sudah menunjuk 10 desa, untuk menjadi role model Desa Mandiri Budaya. Desa yang ditunjuk tersebut, bakal mendapat kucuran dana antara Rp 500 juta - Rp 1 miliar. Kebijakan melalui Paniradya Keistimewaan tersebut, diharapkan tahun 2021 segera bisa dilaksanakan. Regulasi untuk itu masih dalam proses penyempurnaan, tetapi menurut Paniradya Pati Kaistimewaan, Aris Eko Nugroho, konsep tersebut adalah konsentrasi saat ini. (KR /6/9).

Gagasan bahwa desa mandiri budaya tersebut sebenarnya sudah sejak tahun lalu diwacanakan. Tentu akan ada bedanya, desa budaya mandiri dengan desa yang lain. Bukan hanya soal dana, namun soal tata pemerintahan desa nya. Ada SKPD Kaistimewaan dalam desa tersebut. Soal bantuan dana tersebut, memang selaras dengan Pergub DIY No 32 tahun 2020, yang menyebutkan bantuan keuangan pada kelurahan.

Soal pembangunan fokus desa, dike-mukakan Gubernur DIY Sir Sultan HB X dalam ‘Sapa Aruh’ belum lama ini. Memang setelah delapan tahun UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, telah mengubah potensi desa. Sebab berlandaskan Urusan Perangkat Daerah UUK DIY, maka desa menjadi lebih spesifik.

Gubernur yakin jika segala potensi kebaikan itu dilancarkan dari desa dengan strategi desa mengepung kota, maka yang terjadi desa akan menjadi serta pertumbuhan. Dalam penerapannya, pembangunan desa menjadi diprioritaskan. Konsep ini relevan untuk mengakselerasi pembangunan desa dalam mengejar kemajuan perkotaan karena sumber potensinya itu toh berada di perdesaan.

Maka implikasinya, di desa pun juga berlangsung pergeseran budaya desa, meski ini tidak mudah. Setiap pergeseran peradaban ditandai oleh tiga tahap dan selalu mengedepankan rasionalitas, yang

membawa kesamaan kedua. Mau tidak mau memang terjadi pergeseran budaya. Salah satunya karena teknologi. Inilah komponen utama kemajuan peradaban. Maka semakin baik penguasaan beragam iptek, masyarakat akan semakin mendekati kemajuan peradaban.

Nah, masalah penguasaan iptek inilah yang harus dihidupkan di setiap desa sejalan konsep membangun kelompok aktor kreatif sebagai pelaku utama Gerakan Kebudayaan ‘Jogja Gumregah’. Bahkan Pandemi Covid-19 telah mempercepat proses alih teknologi. Memang menurut Gubernur DIY, pada masa awal perubahan tentu akan canggung dan getir, bahkan sakit. Itu biasa dalam sebuah proses perubahan, namun semua itu adalah sebuah proses bertahap.

Memang semuanya yang masuk 10 desa sebagai role model, masuk dalam kategori desa wisata, desapreneur dan desa prima. Sekarang tambah lagi menjadi desa budaya. Pembinaan memang harus dilakukan, bukan saja soal teknologi tetapi ekonomi kreatif tentu harus dilakukan. Ini mengingat pascapandemi, desa seluruh Indonesia tentu sudah an-cang-ancang untuk mengejar keterpurukan pandemi dengan segala kreativitasnya.

Sebelumnya, Desa banyak bertumpu pada BUM Desa namun tidak banyak yang sukses. Bahkan beberapa jalan di tempat ibarat hidup segan mati tak mau. Kesalahan yang biasa dilakukan oleh BUM Desa adalah langsung menentukan bisnis dan baru kemudian memutuskan dengan siapa yang akan menjadi pelanggannya. Kelemahan berikutnya adalah bahwa setelah BUM Desa berdiri kemudian tidak memiliki visi yang jelas dan tidak dikelola dengan baik. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan manajemen usaha sering kali menjadi penyebabnya. Kini tentu menjadi sebuah tantangan bagaimana Desa Mandiri Budaya ini bisa sukses. (***)

Pembuat Terobosan di Perguruan Tinggi Indonesia

(In Memoriam Prof Malik Fadjar)

Edy Suandi Hamid

ia mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/u/2001 tentang Pedoman Pengawasan - Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi. Dengan Kepmen ini, ujian negara praktis



KR-JOKO SANTOSO

BANGSA Indonesia kehilangan satu lagi putra bangsa terbaik yang sudah mendedikasikan sepanjang hayat untuk negeri ini. Prof Abdul Malik Fadjar MSc, tokoh Muhammadiyah yang pernah menjabat Menko Kesra, Menteri Agama, Mendiknas, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Berpulang Senin (7/9) malam pada usia 81 tahun. Jabatan tersebut disandang dalam tempo relatif tidak lama, namun ia meninggalkan *legacy* tak bisa terhapuskan dalam sejarah, utamanya di bidang pendidikan.

Sebelum era reformasi lembaga pendidikan tinggi kita sangat rigid dan birokratik. Ini sangat terasa bagi pengelola perguruan tinggi swasta dan para mahasiswa. Untuk menjadi seorang sarjana atau sarjana muda, prosesnya sangat panjang. Untuk perguruan tinggi yang statusnya belum ‘Disamakan’, untuk menyandang gelar dari lembaga pendidikan tinggi, harus mengikuti ujian negara untuk beberapa matakuliah.

Status

Berapa matakuliah harus ditempuh? Tergantung statusnya: ‘Diakui’ atau ‘Terdaftar’. Untuk PTS status ‘Terdaftar’ jumlah matakuliah ujian negaranya lebih banyak dari yang ‘Diakui’. Untuk yang ‘Disamakan’ matakuliah ujian negaranya tidak ada. Hanya saja sebagian kecil di negeri ini yang bisa memperoleh status ‘Disamakan’. Sampai dengan akhir 1980-an dan awal 1990-an, di DIY seingat penulis hanya UII yang memiliki program studi ‘Disamakan’: prodi Ilmu Hukum dan prodi Ekonomi Perusahaan (Manajemen).

Ujian Negara menjadi momok bagi mahasiswa PTS. Dosen pengujinya sebagian besar berasal dari UGM, atau dari PTS lain yang jumlahnya sangat terbatas, karena ada persyaratan kepangkatan. Apa yang dilakukan Prof Malik Fajar? Belum begitu lama menjadi Mendiknas

tidak ada lagi. Namun untuk pengawasan PT wajib melaporkan pelaksanaan Tri Dharma ke Dirjen Dikti melalui Koordinator PTS di wilayah masing-masing. Setiap perguruan tinggi wajib mendokumentasikan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan Kepmen ini birokrasi ujian di PTS menjadi hilang. Kesan PTS sebagai anak tiri yang didiskriminasi berkurang.

Fakultas Kedokteran

Itu *legacy* yang pertama. Yang kedua, pada masa beliau izin pendirian program studi kedokteran agak diperlonggar. Sebelumnya hanya PTN dan PTS sangat terbatas yang punya Fakultas atau Prodi Kedokteran (FK). Menurut catatan penulis, hanya beberapa PTS yang pu-

Mengusik Feminisme dan Olahraga

Ardian Nur Rizki

sadar, kita berpartisipasi dalam laku perendahan terhadap perempuan kala melihat seorang laki-laki yang menendang bola dengan lemah, lalu berkomentar : “*Tendanganmu seperti perempuan!*”

Paradigma masyarakat yang menganggap perempuan sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya, lambat-lambat dapat direduksi melalui feminisme. Introduksi paham feminisme menjadi kian urgen jika mengingat budaya patriarkat yang masih begitu melekat dalam kultur masyarakat Indonesia.

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V keluaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud, lema ‘feminisme’ memiliki arti, “Gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara perempuan dan laki-laki”. Dari definisi tersebut dapat ditarik benang merah bahwa feminisme bukan hendak mempertentangkan laki-laki dan perempuan dalam oposisi biner sebagai yang lebih tinggi dan lebih rendah, melainkan ‘hanya’ sebagai upaya mereduksi - atau menihilkan - bias gender.

Banyak Bukti

Stigma negatif bahwa perempuan tidak mahir dalam berolahraga layaknya pria harus mulai dibuang jauh. Pada beberapa cabang olahraga, perbedaan kualitas antara laki-laki perempuan mungkin akan tetap ada, tetapi pada cabang lain justru bisa terjadi sebaliknya. Ada banyak bukti untuk itu.

Perempuan pelari marathon wanita asal Norwegia, Grete Waitz, misalnya. Ia mampu mencatat waktu 2 jam 25 menit 41 detik pada New York City

Marathon. Torehan waktu yang diperoleh Grete Waitz ini lebih baik dari pemenang pria saat itu. Jadi, pada cabang olahraga yang membutuhkan daya tahan -dan bukan kekuatan-, perempuan justru berpotensi untuk lebih baik daripada pria. Berbagai penelitian sejenis juga telah membuktikan bahwa jika pengalaman dan peluang bagi perempuan dan laki-laki disamakan. Maka perbedaan kualitas antara pria dan perempuan juga akan berkurang secara bertahap (Giri Wiarto, 2015).

Sah-sah saja jika kemenpora mengusung tema megah untuk memadukan olahraga dengan sains, industri, dan pariwisata. Namun demikian, misi ini seyogianya dimulai dengan mendobrak paradigma usang diskriminasi gender. Olahraga harus dibumikan dan dimasyarakatkan. Baik untuk kaum adam maupun perempuan. Selamat Hari Olahraga Nasional!

*) **Ardian Nur Rizki**, Staf Pendidik di Indonesia Community Center (ICC), Johor Bahru, Malaysia.

Pojok KR

Pergub DIY penanggulangan Covid-19 terbit, sanksi bagi pelanggar.
* **Bagi yang ‘ngeyel’** untuk tertib protokol kesehatan.

Presiden minta waspadai klaster Pilkada.
* **Mulailah**, Paslon memberi keteladanan.

DIY menuju wisatawan berbasis kualitas.
* **Jangan asal jumlahnya banyak.**

Beraksi

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mუსahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiw, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan. Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa. Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono., **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis:** Joko Santoso SSoS, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandrkyk23@yahoo.com, iklandrkyk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk ‘Kedaulatan Rakyat Minggu’ Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarang...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan **Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja. **Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongsa Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. **Kepala Perwakilan:** Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. **Kepala Perwakilan:** Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto. **Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. **Kepala Perwakilan dan Kepala Biro:** Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. **Kepala Perwakilan:** Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. **Kepala Perwakilan:** Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. **Kepala Perwakilan:** Drs Guno Indarjo.